

"TOWARDS AN INCLUSIVE LITERARY CRITIQUE: RECOGNIZING 'PERIPHERAL' LITERATURE AND POLITICAL DISCOURSE"

"Menuju Kritik Sastra Inklusif: Pengakuan terhadap Sastra Pinggiran dan Wacana Politik"

Dwianita Conny Palar^{1*}, Fendy E. W. Parengkuan²

¹ Dosen Tetap FIB-UNSRAT Manado

² Ketua Lemlit STIE Pariwisata Manado

dwianitapalar@gmail.com

Parengkuanfendy221@gmail.com

(*) Corresponding Author

dwianitapalar@gmail.com

How to Cite: Dwianita PC. (2024). Menuju Kritik Sastra Inklusif: Pengakuan terhadap Sastra Pinggiran dan Wacana Politik
doi: [10.36526/js.v3i2.4624](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4624)

Received : 12-10-2024

Revised : 11-11-2024

Accepted : 30-11-2024

Keywords:

pendekatan kesusastraan,
pendekatan sastra politik,
kekayaan budaya bangsa.

Abstract

This study aims to evaluate an inclusive approach in literary criticism with a focus on the recognition of "fringe literature" and its relation to political discourse. Using qualitative descriptive methods, this study reviews the dynamics of various literary approaches that have developed since Indonesia's independence. Based on a literature review, there are eleven main approaches in literary studies, such as morality, literary sociology, literary psychology, and mimetics. However, the political approach is proposed as the 12th element to accommodate literary works that contain political expressions and social unrest, especially in the context of literature outside Java which is often marginalized. This research highlights the inequality in the treatment of literary works that are considered "fringe" compared to "central literature". Fringe literature is often overlooked because it is considered to deviate from the mainstream. This research seeks to place this literary work as an important part of the cultural treasure that can enrich the perspective of Indonesian literary criticism. The results of the study show the need for recognition of marginal literature as part of the diversity of Indonesian literary expressions that are politically and socially relevant.

PENDAHULUAN

Kritik sastra di Indonesia telah melalui berbagai tahap perkembangan sejak masa kemerdekaan. Mulai dari pendekatan formalistik hingga sosiologis, kritik sastra bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan karya sastra dalam kaitannya dengan konteks budaya, sosial, dan politik. Namun, perhatian terhadap karya sastra yang berasal dari daerah pinggiran sering kali masih kurang mendapat tempat dalam diskursus utama kritik sastra Indonesia (Faruk, 2017). Hal ini menyebabkan "sastra pinggiran," atau karya sastra yang berasal dari luar pusat kebudayaan seperti Jakarta dan Jawa, sering kali tidak terintegrasi secara penuh dalam analisis sastra arus utama.

Ketimpangan ini terjadi karena kritik sastra di Indonesia cenderung terpusat pada karya sastra yang memenuhi standar estetika atau ideologi tertentu yang dominan di pusat-pusat kebudayaan. Menurut Teeuw (1984), kritik sastra di Indonesia masih sangat terikat pada tradisi yang mengutamakan karya sastra berbasis tradisi sastra Eropa. Pendekatan seperti ini tidak selalu relevan untuk memahami kompleksitas karya sastra yang lahir dari konteks budaya yang berbeda. Sastra dari daerah pinggiran sering kali membawa perspektif unik yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, ekonomi, dan politik lokal yang tidak sepenuhnya tercermin dalam kerangka kritik sastra yang berpusat pada nilai-nilai pusat.

Lebih jauh, sastra pinggiran sering kali mengandung unsur-unsur politik yang mencerminkan keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan sosial, marginalisasi, dan dominasi budaya pusat (Wiyatmi, 2020). Karya-karya seperti ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas lokal mereka sekaligus menjadi kritik terhadap hegemoni budaya pusat. Dalam hal ini, pendekatan politik dalam kritik sastra diperlukan untuk memahami bagaimana karya sastra dapat berfungsi sebagai alat resistensi dan pembentukan identitas.

Menurut Sapardi Djoko Damono (2015), pendekatan sosiologi sastra selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara sastra dan masyarakat. Namun, pendekatan ini belum secara eksplisit mengakomodasi aspek politik sebagai elemen analisis yang berdiri sendiri. Di sisi lain, pendekatan mimetik yang menekankan representasi realitas dalam sastra juga cenderung mengabaikan dimensi politik yang melekat dalam karya sastra, terutama ketika karya tersebut digunakan untuk menyampaikan kritik sosial atau politik.

Dalam konteks global, teori-teori pascakolonial seperti yang dikemukakan oleh Gayatri Spivak (1988) dan Edward Said (1978) dapat menjadi landasan untuk memahami bagaimana karya sastra dari daerah pinggiran dapat dilihat sebagai wacana perlawanan terhadap dominasi pusat. Dalam teori pascakolonial, karya sastra sering kali dilihat sebagai medium untuk mengartikulasikan suara-suara yang terpinggirkan, termasuk dalam konteks budaya dan politik. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam analisis sastra Indonesia, terutama untuk memahami bagaimana sastra pinggiran berinteraksi dengan kekuasaan politik dan budaya pusat.

Pendekatan politik dalam kritik sastra tidak hanya relevan untuk memahami karya sastra dari daerah pinggiran tetapi juga penting dalam konteks globalisasi. Dalam era modern, di mana budaya semakin homogen karena pengaruh media dan teknologi, sastra lokal sering kali menjadi salah satu cara untuk mempertahankan identitas budaya. Menurut Anderson (1991), sastra memiliki peran penting dalam membangun "komunitas yang dibayangkan" (imagined communities), di mana identitas kolektif dibentuk melalui narasi-narasi lokal.

Namun, dalam praktiknya, sastra pinggiran sering kali mengalami marginalisasi dalam diskursus sastra nasional. Marginalisasi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor estetika tetapi juga oleh ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan budaya. Karya-karya sastra dari daerah pinggiran sering kali dianggap tidak memenuhi standar sastra nasional yang ditetapkan oleh institusi-institusi budaya di pusat, seperti Jakarta. Akibatnya, karya-karya ini jarang diulas oleh kritikus sastra arus utama atau dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.

Pendekatan politik dalam kritik sastra menawarkan perspektif baru untuk memahami karya-karya ini sebagai bagian dari upaya resistensi budaya. Melalui pendekatan ini, karya sastra dari daerah pinggiran dapat dilihat sebagai ekspresi perlawanan terhadap hegemoni pusat, baik dalam hal bahasa, tema, maupun narasi. Sebagai contoh, karya sastra yang menggunakan bahasa daerah sering kali dipandang sebagai cara untuk menolak homogenisasi budaya yang dipaksakan oleh pusat.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas cakupan kritik sastra di Indonesia dengan menempatkan pendekatan politik sebagai elemen yang penting untuk menganalisis karya sastra. Dengan mengintegrasikan perspektif politik dalam analisis sastra, penelitian ini tidak hanya memperkaya teori kritik sastra tetapi juga memberikan ruang bagi karya sastra pinggiran untuk diakui sebagai bagian dari wacana sastra nasional.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal. Dengan menjadikan sastra pinggiran sebagai objek studi yang setara dengan sastra pusat, penelitian ini membantu memperkuat identitas budaya lokal sekaligus mengurangi ketimpangan dalam distribusi kekuasaan budaya. Pendekatan ini juga relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan, di mana kurikulum sastra dapat dirancang untuk mencerminkan keberagaman budaya di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penyeimbangan wacana sastra nasional yang selama ini didominasi oleh karya-karya dari pusat kebudayaan. Dalam konteks Indonesia, di mana keberagaman budaya dan bahasa sangat kaya, dominasi narasi pusat tidak hanya menciptakan

kesenjangan budaya tetapi juga mengancam keberlangsungan identitas lokal. Menurut Anderson (1991), narasi-narasi yang dibangun oleh pusat sering kali mendefinisikan batas-batas identitas nasional, sementara suara-suara dari pinggiran sering terpinggirkan. Dalam hal ini, sastra pinggiran memerlukan ruang lebih besar dalam diskursus nasional untuk menjamin bahwa identitas lokal tetap terwakili dan dilestarikan.

Selain itu, maraknya homogenisasi budaya akibat globalisasi juga memperkuat urgensi penelitian ini. Sastra, sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya, menjadi salah satu alat utama dalam melawan dominasi budaya global yang cenderung mengikis keragaman lokal. Dengan menggunakan pendekatan politik, penelitian ini menyoroti pentingnya sastra pinggiran sebagai alat untuk mempertahankan identitas lokal dan melawan hegemoni budaya pusat maupun global.

Menurut Wiyatmi (2020), pendekatan politik memungkinkan kita untuk melihat sastra tidak hanya sebagai artefak estetika tetapi juga sebagai alat perlawanan dan pemberdayaan. Sastra pinggiran sering kali mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, mendalami sastra pinggiran dengan perspektif politik dapat membuka wacana baru tentang bagaimana masyarakat lokal merespons perubahan sosial dan mempertahankan identitas mereka di tengah dominasi pusat.

Dalam konteks Indonesia, di mana lebih dari 700 bahasa daerah digunakan, pendekatan politik dapat menjadi alat untuk menganalisis bagaimana karya sastra dari daerah-daerah ini berkontribusi pada wacana nasional. Bahasa dan budaya lokal yang sering kali termarginalisasi oleh kebijakan homogenisasi, seperti penggunaan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa resmi, membutuhkan platform untuk mengekspresikan dirinya.

Pendekatan politik juga relevan untuk memahami bagaimana sastra pinggiran dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Sebagai contoh, karya-karya sastra dari daerah konflik, seperti Papua atau Aceh, sering kali memuat kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil atau merugikan masyarakat lokal. Dengan menggunakan pendekatan politik, kritik-kritik ini dapat dipahami sebagai bagian dari perjuangan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan.

Teori pascakolonial yang dikembangkan oleh Spivak (1988) dan Said (1978) juga relevan dalam konteks ini. Teori ini menunjukkan bagaimana sastra dari masyarakat terpinggirkan dapat digunakan untuk menantang narasi dominan yang sering kali mendiskreditkan atau mengabaikan pengalaman mereka. Dalam konteks Indonesia, teori ini dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana karya sastra pinggiran merepresentasikan pengalaman masyarakat lokal yang sering kali diabaikan oleh narasi nasional.

Ketimpangan dalam kritik sastra dapat berdampak buruk pada keberlanjutan budaya lokal. Jika karya sastra pinggiran terus terabaikan, hal ini dapat mengarah pada homogenisasi budaya yang mengancam keberagaman budaya Indonesia. Sastra lokal yang tidak diakui atau diapresiasi pada akhirnya akan kehilangan relevansinya dan berpotensi punah.

Selain itu, marginalisasi sastra pinggiran juga dapat memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi antara pusat dan daerah. Sastra, sebagai cerminan budaya, memiliki potensi untuk menjadi alat pemberdayaan yang dapat mengangkat isu-isu lokal ke tingkat nasional. Jika karya sastra pinggiran tidak diberikan ruang yang memadai, suara-suara masyarakat lokal akan terus terpinggirkan dalam diskursus nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi peran pendekatan politik dalam kritik sastra Indonesia, dengan fokus pada sastra pinggiran. Pendekatan ini sesuai untuk memahami fenomena yang kompleks, seperti hubungan antara kekuasaan politik dan ekspresi budaya dalam karya sastra (Creswell, 2014). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena tanpa memaksakan generalisasi atau hipotesis awal (Sugiyono, 2016).

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer:

Karya sastra dari daerah pinggiran Indonesia, seperti Papua, Aceh, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, yang memuat tema politik, marginalisasi, dan identitas budaya. Contoh karya yang dianalisis mencakup puisi, cerpen, dan novel yang berisi kritik terhadap dominasi pusat.

Data Sekunder:

Literatur akademik, artikel jurnal, dan buku yang membahas kritik sastra, pendekatan politik, teori pascakolonial, serta relevansi sastra pinggiran, seperti karya Edward Said (1978), Spivak (1988), dan Faruk (2017).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

Kajian Literatur:

Mengidentifikasi dan menelaah literatur relevan dari jurnal, buku, dan artikel yang membahas kritik sastra, teori politik, serta sastra pinggiran. Literatur ini diakses melalui database akademik seperti JSTOR, Google Scholar, dan Perpustakaan Nasional.

Referensi utama meliputi teori kritik sosiologis oleh Sapardi Djoko Damono (2015), serta pendekatan pascakolonial oleh Said (1978) dan Spivak (1988).

Analisis Teks Sastra:

Memilih karya sastra dari daerah pinggiran yang relevan dengan tema politik dan marginalisasi.

Menandai elemen-elemen dalam teks yang mencerminkan kritik sosial, resistensi politik, atau pembentukan identitas budaya.

Wawancara (Opsional):

Jika memungkinkan, wawancara dilakukan dengan penulis sastra pinggiran, kritikus sastra, atau akademisi untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai peran pendekatan politik dalam karya sastra mereka.

3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk menafsirkan makna mendalam dari teks sastra dengan menghubungkannya pada konteks sosial dan politik (Krippendorff, 2018). Proses analisis melibatkan langkah-langkah berikut:

Kategorisasi Tema:

Mengelompokkan elemen-elemen dalam karya sastra berdasarkan tema utama, seperti marginalisasi budaya, kritik politik, dan perlawanan terhadap dominasi pusat.

Analisis Kontekstual:

Menganalisis karya sastra dalam konteks sosial-politik daerah asalnya untuk memahami dinamika kekuasaan dan resistensi yang diungkapkan dalam teks.

Integrasi Teori:

Menggunakan teori pascakolonial (Said, 1978; Spivak, 1988) dan kritik sosiologis (Sapardi Djoko Damono, 2015) untuk mengeksplorasi hubungan antara narasi sastra dan wacana politik.

Penarikan Kesimpulan:

Menarik kesimpulan tentang bagaimana pendekatan politik dapat digunakan untuk memperkaya analisis kritik sastra Indonesia, khususnya dalam memahami karya sastra pinggiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Minimnya Representasi Sastra Bernuansa Politis dari Minahasa

Berdasarkan data yang diperoleh, karya sastra bernuansa politis yang berasal dari budaya Minahasa masih jarang ditemukan. Berbeda dengan karya-karya dari daerah lain, seperti novel *Keluarga Gerilya* oleh Pramoedya Ananta Toer (1949) atau puisi *Karawang Bekasi* oleh Chairil Anwar (1943), yang merepresentasikan realitas politik masa revolusi, karya dari Minahasa belum banyak diangkat dalam diskursus politik sastra. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan representasi budaya dalam kajian sastra nasional. Kesenjangan ini mempertegas pentingnya pendekatan politik dalam menyoroati karya-karya yang berasal dari daerah, termasuk Minahasa, untuk menggali wacana lokal yang tersembunyi di balik narasi dominan.

2. Peran Narasi dan Prosa dalam Sastra Bernuansa Politi

Dalam konteks sastra bernuansa politis, narasi sering kali menjadi medium utama untuk menyampaikan kritik sosial atau politik. Sebagai contoh, karya prosa seperti *Keluarga Gerilya* menggunakan narasi untuk menggambarkan ekses revolusi sosial pada masa kemerdekaan. Pendekatan mimetik, yang menekankan hubungan antara karya sastra dan realitas sosial, menunjukkan bahwa narasi bukan sekadar alat estetis, tetapi juga sarana untuk merepresentasikan peristiwa politik yang dialami oleh masyarakat (Winarti, 2016). Dalam tradisi sastra Minahasa, potensi penggunaan narasi yang mengangkat kosakata lokal dengan nuansa politik perlu dieksplorasi lebih dalam, terutama untuk menyoroati isu-isu lokal seperti hubungan kekuasaan pusat dan daerah.

3. Pendekatan Mimetik dalam Analisis Karya Sastra

Pendekatan mimetik, yang fokus pada pengaruh realitas sosial terhadap karya sastra, mencakup analisis narasi dan puisi sebagai objek kajian. Melalui pendekatan ini, term-term politik yang digunakan dalam narasi dapat ditelusuri asal-usulnya dalam bahasa lokal serta bagaimana term tersebut mencerminkan situasi sosial atau politik tertentu (Wiyatmi, 2020). Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi eksplorasi terhadap karya yang belum banyak dikaji, seperti sastra dari Minahasa, untuk menggambarkan bagaimana isu-isu lokal dapat menjadi bagian dari diskursus nasional.

4. Term Politik dan Nilai Kebaruan dalam Sastra Pinggiran

Term politik yang sering dianggap modern sebenarnya memiliki akar yang kuat dalam penggunaan bahasa lokal. Dalam karya sastra, term politik seperti "kebijakan," "kampanye," atau "dokumen politik" dapat diinterpretasikan melalui lensa budaya lokal untuk menghasilkan perspektif baru yang lebih inklusif (Pribadi, 2013). Sastra pinggiran, termasuk dari Minahasa, memiliki potensi besar untuk memperkaya diskursus nasional dengan memperkenalkan nilai-nilai kebaruan yang berbasis pada tradisi lokal.

Analisis Kekosongan Representasi Sastra Minahasa

Minimnya karya sastra bernuansa politis dari Minahasa dalam literatur nasional menunjukkan dominasi narasi pusat dalam diskursus sastra. Fenomena ini relevan dengan teori pascakolonial Edward Said (1978), yang menyatakan bahwa karya sastra dari pinggiran sering kali terpinggirkan karena tidak memenuhi standar estetika atau ideologi yang ditentukan oleh pusat. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pendekatan politik dapat digunakan untuk menggali dan memvalidasi narasi lokal yang mencerminkan isu-isu politik di Minahasa, seperti marginalisasi daerah atau konflik identitas budaya.

1. Relevansi Pendekatan Mimetik dalam Sastra Bernuansa Politis

Pendekatan mimetik menawarkan perspektif yang komprehensif dalam memahami hubungan antara karya sastra dan realitas sosial-politik. Seperti yang dikemukakan oleh Winarti (2016),

fokus pendekatan mimetik pada apa yang diinderai oleh pengarang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana narasi dalam karya sastra mencerminkan pengalaman nyata masyarakat. Dalam konteks Minahasa, pendekatan ini dapat digunakan untuk meneliti bagaimana tradisi lokal, seperti penggunaan bahasa daerah atau ritual budaya, diintegrasikan dalam narasi politik untuk menciptakan karya yang otentik dan relevan.

2. **Potensi Sastra Minahasa dalam Mengangkat Narasi Lokal Bernuansa Politis**

Meskipun belum banyak dikaji, sastra Minahasa memiliki potensi besar untuk mengungkapkan narasi lokal yang kaya dengan tema-tema politis. Misalnya, isu hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah atau marginalisasi budaya lokal dapat diangkat melalui prosa atau puisi yang menggunakan term politik berbasis budaya Minahasa. Pendekatan politik memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap bagaimana term-term ini digunakan untuk menyampaikan kritik atau aspirasi masyarakat lokal.

3. **Implikasi Pendekatan Politik dalam Kritik Sastra Nasional**

Mengintegrasikan pendekatan politik dalam kritik sastra nasional tidak hanya memberikan validasi terhadap karya sastra pinggiran tetapi juga memperluas cakupan diskursus sastra. Dengan menyoroti narasi-narasi lokal yang belum banyak mendapat perhatian, seperti dari Minahasa, pendekatan politik dapat menjadi alat untuk menciptakan diskursus yang lebih inklusif dan representatif. Seperti yang diungkapkan oleh Faruk (2017), kritik sastra harus mampu menyeimbangkan antara nilai estetika dan nilai sosial-politik untuk mencerminkan kompleksitas budaya Indonesia.

4. **Keterkaitan Antara Tradisi Lokal dan Nilai Kebaruan dalam Sastra**

Term-term politik yang dianggap modern, seperti "kebijakan" atau "kampanye," sebenarnya memiliki relevansi dalam konteks lokal ketika diterjemahkan ke dalam bahasa dan budaya daerah. Dalam tradisi sastra Minahasa, penggunaan term ini dapat menciptakan karya yang tidak hanya estetis tetapi juga bermakna secara sosial dan politis. Hal ini sejalan dengan pandangan Sapardi Djoko Damono (2015) bahwa sastra berfungsi sebagai medium untuk merefleksikan dan mengkritisi realitas sosial-politik.

5. **Sastra Pinggiran sebagai Alat Kritik Politik dan Sosial**

Sastra pinggiran sering kali memuat kritik terhadap ketimpangan sosial, politik, dan budaya, meskipun narasi ini jarang mendapat pengakuan dalam diskursus sastra arus utama. Dalam tradisi sastra Indonesia, karya-karya seperti *Keluarga Gerilya* karya Pramoedya Ananta Toer dan *Karawang Bekasi* oleh Chairil Anwar telah diakui sebagai representasi kritik sosial pada masa revolusi. Namun, karya dari daerah-daerah seperti Minahasa belum mendapatkan tempat yang sama.

Pendekatan politik dalam analisis sastra memberikan ruang untuk mengeksplorasi bagaimana narasi dari sastra pinggiran dapat menjadi alat untuk menantang dominasi narasi pusat. Menurut Teeuw (1984), kritik sastra harus mampu melampaui batas estetika dan mengakomodasi karya yang merepresentasikan pengalaman sosial dan politik masyarakat lokal. Dengan demikian, sastra pinggiran dapat dilihat sebagai ekspresi resistensi budaya dan politik yang valid.

6. **Pendekatan Mimetik untuk Menghubungkan Tradisi Lokal dengan Isu Politis**

Pendekatan mimetik, seperti yang dijelaskan oleh Winarti (2016), menekankan pentingnya hubungan antara karya sastra dan realitas sosial. Dalam konteks sastra pinggiran, pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana tradisi lokal dapat dihubungkan dengan isu-isu politis. Misalnya, dalam budaya Minahasa, penggunaan istilah lokal seperti "mapalus" (kerja sama kolektif) dapat diinterpretasikan sebagai metafora politik yang mencerminkan solidaritas masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial.

Dengan menggunakan pendekatan ini, analisis karya sastra dari Minahasa dapat mengungkapkan bagaimana narasi lokal menjadi alat untuk menyampaikan kritik terhadap

kebijakan pusat yang sering kali dianggap tidak adil. Pendekatan ini juga memberikan validasi terhadap narasi lokal sebagai bagian integral dari diskursus sastra nasional.

7. **Term Politik dalam Narasi Lokal: Sebuah Inovasi Linguistik**

Salah satu kontribusi penting dari sastra pinggiran adalah pengenalan term politik berbasis budaya lokal. Term seperti "kebijakan politik," "kampanye," atau "agenda" dapat diterjemahkan ke dalam konteks budaya daerah untuk menciptakan inovasi linguistik yang memperkaya diskursus politik dalam sastra. Pribadi (2013) mencatat bahwa analisis sistem politik dalam sastra dapat mengungkapkan bagaimana istilah-istilah ini digunakan untuk merepresentasikan dinamika kekuasaan dalam masyarakat.

Dalam konteks Minahasa, istilah lokal dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Sebagai contoh, narasi tentang upaya masyarakat lokal mempertahankan tradisi mereka di tengah tekanan modernisasi dapat menjadi metafora untuk kritik terhadap sentralisasi kebijakan politik.

8. **Implikasi bagi Kritik Sastra dan Kebijakan Budaya**

Pendekatan politik dalam kritik sastra memiliki implikasi yang luas, baik untuk literatur akademik maupun kebijakan budaya. Secara teoritis, pendekatan ini memperluas cakupan kritik sastra dengan memasukkan dimensi politik sebagai elemen analisis yang sah. Pendekatan ini juga memberikan alat untuk memahami bagaimana karya sastra dari daerah pinggiran dapat berfungsi sebagai alat resistensi budaya dan politik.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendesain kurikulum pendidikan yang lebih inklusif, di mana karya sastra dari daerah pinggiran mendapatkan tempat yang sama dengan karya dari pusat. Selain itu, pendekatan ini juga relevan untuk kebijakan budaya, seperti mendukung penerbitan dan distribusi karya sastra pinggiran untuk meningkatkan pengakuan terhadap keberagaman budaya di Indonesia.

9. **Relevansi dengan Konteks Pascakolonial**

Teori pascakolonial, seperti yang dikemukakan oleh Edward Said (1978) dan Gayatri Spivak (1988), relevan dalam memahami marginalisasi sastra pinggiran. Dalam konteks ini, sastra dari Minahasa dapat dilihat sebagai upaya untuk menantang dominasi narasi pusat, yang sering kali mendefinisikan identitas nasional berdasarkan perspektif Jawa atau Jakarta.

Teori ini juga menunjukkan bahwa narasi dari daerah pinggiran tidak hanya merepresentasikan pengalaman lokal tetapi juga berkontribusi pada diskursus global tentang hubungan kekuasaan dan identitas. Dengan menggunakan teori ini, pendekatan politik dalam kritik sastra dapat memberikan validasi terhadap narasi lokal sebagai bagian dari wacana yang lebih luas tentang keberagaman dan inklusivitas.

10. **Perkembangan Sastra Politik dalam Konteks Sejarah**

Sejak masa pendudukan Jepang hingga revolusi kemerdekaan, sastra telah memainkan peran penting dalam mencatat dan mengartikulasikan keresahan politik masyarakat. Angkatan '45 menjadi tonggak awal di mana sastrawan seperti Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, dan Mochtar Lubis menggunakan karya mereka sebagai medium untuk menyuarakan aspirasi politik dan sosial (Teeuw, 1984). Fenomena ini semakin berkembang menjelang runtuhnya Orde Baru, ketika tekanan sosial dan ketidakpuasan terhadap penguasa mencapai puncaknya. Sastra pada masa itu berfungsi tidak hanya sebagai alat ekspresi individual tetapi juga sebagai "klep pengaman" untuk meredakan konflik sosial yang destruktif. Dalam konteks ini, pendekatan mimetik memiliki relevansi tinggi karena memungkinkan analisis terhadap bagaimana karya sastra mencerminkan realitas sosial-politik. Sebagai contoh, puisi-puisi WS Rendra yang sering kali mengkritik kebijakan Orde Baru adalah bukti nyata bagaimana narasi sastra dapat menjadi alat perlawanan yang elegan namun efektif (Damono, 2015).

11. **Kebangkitan Sastra Politik Pasca-Reformasi**

Era pasca-Reformasi menandai titik kebangkitan baru bagi sastra politik di Indonesia. Tahun 2005 dianggap sebagai penanda munculnya kebebasan ekspresif di kalangan sastrawan dan

penyair. Dalam situasi ini, para sastrawan mulai memanfaatkan berbagai isu politik aktual sebagai sumber inspirasi. Fenomena ini sejalan dengan teori pascakolonial Edward Said (1978), yang menekankan pentingnya mengangkat narasi-narasi lokal untuk melawan hegemoni kekuasaan pusat.

Penggunaan kosakata dan frasa bernuansa politik yang semakin luas, seperti "reformasi sistem," "politik dinasti," dan "polarisasi," menunjukkan bahwa sastrawan tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif tetapi juga sebagai agen perubahan. Dengan memanfaatkan term politik aktual, karya sastra pasca-Reformasi mencerminkan dinamika politik yang lebih kompleks dan inklusif.

12. Term-Term Politik dalam Karya Sastra: Sebuah Inovasi

Sebanyak 90 kosakata/frasa politik yang telah dikumpulkan, seperti "koalisi," "oposisi," "hak prerogatif," dan "cawe-cawe," menunjukkan bahwa sastrawan dan penyair memiliki wawasan luas tentang dinamika politik nasional. Term-term ini digunakan secara strategis dalam karya sastra untuk menciptakan narasi yang relevan dengan situasi politik aktual. Menurut Pribadi (2013), penggunaan term politik dalam sastra tidak hanya memperkaya narasi tetapi juga memberikan konteks yang lebih dalam untuk memahami hubungan antara kekuasaan dan masyarakat.

Sebagai contoh, istilah "politik dinasti" dapat diinterpretasikan dalam narasi sastra sebagai kritik terhadap nepotisme dalam sistem politik lokal. Sementara itu, penggunaan frasa seperti "restorasi demokrasi" dalam puisi atau prosa mencerminkan harapan masyarakat terhadap reformasi politik yang lebih adil dan transparan.

13. Relevansi Sastra Politik dengan Situasi Nasional

Situasi politik yang terus memanas pasca-Pemilu dan menjelang Pilkada menjadi peluang emas bagi sastrawan untuk menghasilkan karya-karya yang bernuansa politik. Sastra dapat berfungsi sebagai potret sosial yang merekam dan mengkritisi fenomena politik aktual. Dalam konteks ini, karya sastra seperti "cerpen politik," "puisi politik," atau "novel politik" dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politik. Pendekatan mimetik memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap bagaimana karya sastra mencerminkan dan memengaruhi dinamika politik. Misalnya, puisi yang menggunakan frasa seperti "kolaborasi politik" atau "reformasi sistem" dapat menjadi alat untuk memengaruhi opini publik dan mendorong **perubahan sosial**.

14. Implikasi Sastra Politik bagi Kritik Sastra dan Kebijakan Budaya

Sastra politik memiliki potensi besar untuk memperkaya kritik sastra dengan menambahkan dimensi politik sebagai elemen analisis utama. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya memasukkan karya sastra politik dalam kurikulum pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hubungan antara sastra dan realitas sosial-politik. Dalam kebijakan budaya, mendukung penerbitan dan distribusi karya sastra politik dapat menjadi langkah penting untuk memperluas diskursus nasional. Hal ini juga relevan dalam konteks globalisasi, di mana sastra politik dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan identitas budaya lokal sambil berkontribusi pada diskursus global tentang keadilan sosial dan demokrasi.

Pembahasan

Kosakata/Frasa Bernuansa Politik Yang Digunakan Sejak Medio Februari Hingga Ultimo Mei 2024:

abreviasi	simplifikasi	pidato politik
atenuasi	permisifikasi	partisipasi politik
koalisi	oposisi	viralisasi
publifisasi	prediksi	komposisi
fraksi	spesifikasi	afiliasi
signifikasi	verifikasi	mekanisme

otomatis	korupsi	intoleransi
rekomendasi	genetik	inspirasi
aspirasi	kolaborasi	institusi-institusi
demokrasi	konsolidasi	reformasi sistem
restorasi	adaptif	produktif
kreatif	kompetitif	hilirisasi
industrialisasi	pemerataan ekonomi	pemberantasan kemiskinan
membangun dari desa	membangun dari bawah	kolaborasi
adil dan makmur	praktisi	akademisi
atensi	obsesi	ambisi
pragmatis	idealis	sarkastis
eufemistis	poles	raskin
lompat pagar	lengser	orientasi
polarisasi	hak prerogatif	BLT
suksesi	kaderisasi	konspirasi
solidaritas	substansi	esensi
aspirasi	konspirasi	fragmentasi
segregasi	segmentasi	diversifikasi
anomali	algoritma	manual
konglomerasi	sontoloyo	kontrak politik
fraksi partai di DPR	politik partisan	pertanggungjawaban partai
janji politik	visi/misi politik	politik kemiskinan
politik pendidikan	carut marut	cawe-cawe
politik dinasti	silaturahmi	nomor urut

Dari sekitar 90 kosakata/frasa yang dikutip di atas, dapat diklasifikasi antara lain didominasi oleh kata serapan bahasa asing, pinjaman bahasa daerah, atau lainnya. Oleh karena itu, seorang penulis cerpen, novel, atau prosa, juga para penyair, mau tidak mau hendaknya memiliki wawasan politik yang cukup luas setidaknya dalam upaya menggunakan dan mengemas satu atau beberapa kosakata/frasa di atas jika hendak melarutkan diri dan karyanya dalam menjangkau pengertian yang khas. Dengan telah selesainya Pemilihan Umum untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPD-RI dan Anggota DPR-RI, juga anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota. ternyata emosi dan nuansa politik masih terus dipelihara guna melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) untuk memilih Gubernur/Bupati/Walikota yang definitif. Hal ini dapat dianggap sebagai kesempatan emas bagi sastrawan dan penyair karna dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang mampu dalam mendongkel kebekuan dan menafikan kehambatan berkarya.

Dalam situasi politik nasional dan daerah yang masih memanas, dianggap sebagai kesempatan bagi munculnya prakarsa-prakarsa baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam seni sastra. Tidak wajarkah jika di dalam situasi seperti ini muncul berbagai produk sastra yang dapat disebut "cerpen politik", "novel politik", "skenario politik", "drama politik", "komik politik", atau "puisi politik". Jika ada yang berpendapat bahwa karya sastra apapun, di samping sifatnya yang sering ilusi dan imajiner, ia adalah merupakan potret sosial yang menggelitik siapapun pada waktu dilahirkan. Gelimang dan gemilang euforia politik tidak ada salahnya jika ada juga sastrawan dan penyair kita yang peduli dengan berbagai cara untuk ikut sebagai penggembira sekalipun. Sastrawan dan penyair dapat menjadikan UUD 1945 sebagai kriteria sumber kebenaran dan menganggap bahwa semua peraturan dan kebijakan yang bersumber dari situ sebagai sekedar pembenaran.

Berikut kategori dan kosakatanya dalam sebuah budaya bahas:

Kategori	Kosakata/Frasa
Kata Serapan Asing	Abreviasi, atenuasi, permisifikasi, verifikasi, otomatis, aspirasi, koalisi, oposisi, reformasi sistem
Konsep Politik Umum	Pidato politik, partisipasi politik, konsolidasi, rekomendasi, demokrasi, kolaborasi, solidaritas
Istilah Ekonomi	Hilirisasi, industrialisasi, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, adil dan makmur
Istilah Pendidikan dan Sosial	Politik pendidikan, politik dinasti, BLT, raskin, silaturahmi, nomor urut
Istilah Pemerintahan	Restorasi, hak prerogatif, kaderisasi, suksesi, kontrak politik, janji politik, visi/misi politik
Kata Populer atau Sarkasme	Sontoloyo, lompat pagar, lengser, carut-marut, cawe-cawe
Istilah Strategis	Strategi politik, agenda politik, komposisi, afiliasi, mekanisme, fragmentasi, diversifikasi
Istilah Teknologi dan Data	Algoritma, otomatis, manual, prediksi, viralisasi, publikasi
Istilah Psikologis atau Sifat	Pragmatis, idealis, ambisi, eufemistis, sarkastis, poles, atensi, obsesi
Lain-lain	Politik partisan, substansi, esensi, segregasi, segmentasi, genetik

Pembahasan: Lepaskan Ikatan Lama

1. Peran Sastra dalam Sejarah Perjuangan Bangsa

Sastra selalu memainkan peran penting dalam merekam, mencerminkan, dan bahkan memengaruhi dinamika politik suatu bangsa. Sejak masa pendudukan Jepang (1942–1945) hingga revolusi kemerdekaan (1945–1950), sastrawan dan penyair telah menjadi pelopor dalam menyuarakan keresahan sosial dan politik masyarakat. Angkatan '45, dengan tokoh-tokoh seperti Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, dan Mochtar Lubis, menunjukkan bagaimana sastra dapat digunakan sebagai alat untuk mengartikulasikan aspirasi kemerdekaan dan nilai-nilai luhur bangsa (Teeuw, 1984).

Periode ini juga menandai awal diterimanya sastrawan dan penyair sebagai pengamat sekaligus kritikus sosial. Dalam karya-karya mereka, peristiwa politik dijadikan sebagai inspirasi untuk menyampaikan kritik atau refleksi terhadap perubahan sosial yang sedang berlangsung. Hal ini memperlihatkan bahwa sastra bukan hanya sekadar medium estetis, tetapi juga alat yang kuat untuk menggerakkan kesadaran politik.

2. Dinamika Politik dan Kebangkitan Sastra Kritik

Semakin mendekati runtuhnya Orde Baru, tekanan sosial dan keresahan politik masyarakat semakin banyak diungkapkan dalam karya sastra. Era ini memperlihatkan bagaimana sastrawan seperti WS Rendra dan Gunawan Mohamad menggunakan puisi dan esai sebagai alat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintahan otoriter (Damono, 2015). Namun, ungkapan hati nurani yang disampaikan melalui karya-karya mereka sering kali dianggap sebagai ancaman oleh penguasa.

Tindakan represif terhadap sastrawan pada masa itu, seperti pelarangan karya atau intimidasi, mencerminkan ketakutan pemerintah terhadap kekuatan kritik yang terkandung dalam sastra. Meski demikian, karya-karya ini tetap menjadi saksi penting dari ketegangan sosial-politik dan

berfungsi sebagai "klep pengaman" yang mencegah konflik destruktif melalui ekspresi yang elegan dan artistik.

3. **Era Kebebasan Ekspresi Pasca-2005**

Tahun 2005 dapat dianggap sebagai titik balik dalam sejarah sastra politik di Indonesia. Pada era ini, kebebasan berekspresi mulai mendapatkan tempat yang lebih besar. Sastrawan, penyair, dan akademisi menikmati ruang yang lebih luas untuk bereksperimen dan mengekspresikan pandangan mereka terhadap isu-isu politik tanpa khawatir akan tindakan represif.

Fenomena ini disambut dengan antusiasme, karena memberikan peluang bagi sastrawan untuk mengeksplorasi berbagai tema dan term politik yang relevan dengan dinamika sosial. Kosakata politik seperti "reformasi sistem," "politik dinasti," dan "polarisasi" menjadi bagian penting dari narasi sastra modern, mencerminkan keterlibatan sastrawan dalam diskursus politik yang lebih inklusif.

4. **Sastra sebagai Medium Transformasi Sosial**

Sastra politik bukan hanya alat kritik, tetapi juga medium untuk memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok masyarakat. Menurut teori pascakolonial Edward Said (1978), karya sastra dapat berfungsi untuk menantang dominasi kekuasaan dan memberikan ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan. Dalam konteks Indonesia, karya-karya dari pinggiran atau daerah yang menggunakan term politik menjadi alat untuk menyeimbangkan narasi nasional yang sering kali berpusat pada Jawa atau Jakarta.

5. **Menghapus Ikatan Lama: Kebangkitan Sastra Inklusif**

Era pasca-Orde Baru dan Reformasi telah membuka peluang besar untuk menghapus dikotomi lama antara pusat dan pinggiran, antara karya unggulan dan karya biasa. Pendekatan ini menegaskan bahwa semua karya sastra memiliki nilai yang setara jika dilihat dari kontribusinya terhadap diskursus budaya dan politik.

Terlepasnya ikatan lama memberikan ruang bagi sastrawan untuk mengeksplorasi narasi yang lebih beragam dan relevan. Mereka tidak lagi terikat pada batasan ideologis atau estetika tertentu, melainkan dapat menjembatani berbagai nilai dan aspirasi masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan Faruk (2017), yang menyatakan bahwa kritik sastra harus mampu mengakomodasi keberagaman perspektif dan membuka ruang bagi dialog yang lebih luas.

6. **Sastra Politik dan Era Digital**

Di era digital, sastra politik mendapatkan panggung baru melalui media sosial. Kosakata dan frasa politik, seperti "carut-marut," "polarisasi," dan "reformasi sistem," tidak hanya menjadi bagian dari karya sastra tetapi juga mendominasi diskusi publik. Sastrawan dan penyair kini memiliki akses langsung ke audiens yang lebih luas, memungkinkan mereka untuk menyampaikan kritik dan refleksi dengan cara yang lebih interaktif dan demokratis.

Namun, era digital juga membawa tantangan baru, seperti potensi polarisasi akibat penggunaan term politik yang manipulatif. Oleh karena itu, sastrawan dan akademisi perlu mengambil peran aktif dalam menjaga integritas narasi politik dalam karya sastra agar tetap mencerminkan nilai-nilai universal dan adiluhung bangsa.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan politik, khususnya melalui lensa mimetik, memberikan peluang besar untuk mengeksplorasi karya sastra pinggiran seperti dari Minahasa. Dengan mengintegrasikan narasi lokal yang kaya dengan term politik, karya sastra dari daerah dapat berkontribusi pada diskursus nasional yang lebih inklusif. Pendekatan ini juga relevan untuk melawan marginalisasi budaya dan menciptakan ruang bagi ekspresi identitas lokal dalam kerangka sastra Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso Books.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Damono, S. D. (2015). *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Grasindo.
- Faruk. (2017). *Metodologi Penelitian Sastra: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications.
- Pribadi, T. (2013). "Analisis Sistem Politik dalam Sastra." *Jurnal Politik Indonesia*.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Sapardi Djoko Damono. (2015). *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Grasindo.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Spivak, G. C. (1988). "Can the Subaltern Speak?" dalam *Marxism and the Interpretation of Culture*. University of Illinois Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teeuw, A. (1984). *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Winarti, E. (2016). Pendekatan Mimetik dalam Kritik Sastra. *Jurnal Sastra Nusantara*.